

**RENCANA KERJA
TAHUN 2023**



**KECAMATAN KARANGSEMBUNG
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.2. Program dan Kegiatan
- 3.3. Jumlah Program dan Kegiatan
- 3.5. Perumusan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas ridho dan rahmat-Nya kami telah menyusun Rencana Kerja tahun 2023 Kecamatan Karangsembung. Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif yang menerangkan capaian kinerja dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, permasalahan yang masih dihadapi pada pelaksanaan Rencana Kerja SKPD periode sebelumnya. Kami menyadari sepenuhnya penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon saran dan kritiknya untuk perbaikan selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja tahun 2023 disusun sebagai acuan dan gambaran untuk pencapaian target dan realisasi kinerja sesuai Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan Karangsembung.

Karangsembung, Juni 2022
CAMAT KARANGSEMBUNG

SUJATMOKO, SP., MP
Pembina TK.I
NIP.19750226 200604 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Kerja yang disusun Kecamatan Karangsembung merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2019-2024. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka setiap SKPD/OPD di daerah wajib membuat dokumen Rencana Kerja (Renja) di tahun yang akan datang, yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008. tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Karangsembung merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, 1 (satu) Sub Bagian Program Keuangan, 1 (satu) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 4 (empat) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, Seksi Ketertiban dan Keamanan dan Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dimaksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sinergi dan keberlanjutan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 2019-2024.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan hasil pembangunan dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon
2. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang meliputi RENSTRA SKPD, RKPD, RENJA SKPD;

4. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan;

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 Kabupaten Cirebon peran serta Kecamatan Karangsembung harus dapat menjabarkan seluruh program dan kegiatannya selama periode tahun 2019-2024 yang tertuang dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Kecamatan Karangsembung. Penyusunan Renja Tahun 2023 ini merupakan landasan bagi peningkatan pembangunan yaitu membangun Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Karangsembung.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019-2024 yaitu : “ **Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman** ”.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Seri);
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

1.3.1 Maksud

Penyusunan rencana kerja ini dimaksudkan untuk menyusun program dan kegiatan kinerja satuan kerja perangkat daerah di Kecamatan Karangsembung sehingga diharapkan di tahun mendatang kinerjanya senantiasa lebih baik.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja ini yaitu :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai capaian visi dan misi satuan kerja perangkat daerah di Kecamatan Karangsembung.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang direncanakan dengan capaian target dan realisasi capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah di Kecamatan Karangsembung.
3. Sebagai bahan acuan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan Karangsembung.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Umum Organisasi, Maksud dan Tujuan penyusunan renja, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Kerja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, Analisis kinerja pelayanan SKPD dan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan rencana kerja (Renja) yang tertuang dalam capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategi melalui pencapaian Program dan Kegiatan, Perumusan Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas Rencana Kerja secara umum yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangsembung.

Lampiran :

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJASKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya (terlampir).

Realisasi Capaian Kinerja TA 2022, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan.

Kecamatan Karangsembung melaksanakan 4 (empat) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan. Pencapaian indikator kinerja urusan ini adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78.52% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.398.343.200,- dan terealisasi sebesar Rp.2.360.609.840,- sisa sebesar Rp.232.246.904,- atau tercapai sebesar 99,32%.

Outcome Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah.

Target Capaian 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.315.900,- dan terealisasi sebesar Rp.28.123.900,- sisa sebesar Rp.192.000,- atau tercapai sebesar 99.32%.

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.320.900,- dan terealisasi sebesar Rp.24.128.900,- sisa sebesar Rp.192.000,- atau tercapai sebesar 99.21%.

Output Subkegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan. Target Capaian 100%.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.995.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.995.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dihasilkan. Target Capaian 100%.

- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.035.865.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.809.470.750,- sisa sebesar Rp.226.395.050,- atau tercapai sebesar 88.88%.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan pengadministrasian keuangan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.029.366.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.802.970.950,- sisa sebesar Rp.226.395.050,- atau tercapai sebesar 88.84%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap Bulan. Target Capaian 17 pegawai.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.499.800,- dan terealisasi sebesar Rp.3.499.800,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Subkegiatan adalah Jumlah laporan Akhir Tahun yang dihasilkan. Target Capaian 1 laporan.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.000.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Subkegiatan adalah Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan. Target Capaian 1 laporan.

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.344.100,- dan terealisasi sebesar Rp.68.344.100,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.558.800,- dan terealisasi sebesar Rp.4.558.800,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target capaian 5 jenis.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.989.400,- dan terealisasi sebesar Rp.32.989.400,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Target capaian.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.494.800,- dan terealisasi sebesar Rp.7.494.800,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan. Target capaian 2 Jenis.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.102.500,- dan terealisasi sebesar Rp.3.102.500,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target capaian 2 media.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.198.600,- dan terealisasi sebesar Rp.13.198.600,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah ATK yang disediakan. Target capaian 28 jenis.

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.000.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah). Target capaian 110 laporan.

D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.563.744,- dan terealisasi sebesar Rp.18.081.490,- sisa sebesar Rp.3.482.254,- atau tercapai sebesar 83%.

Output kegiatan adalah Tersedianya jasa perbaikan/jumlah peralatan kerja yang diperbaiki.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.423.744,- dan terealisasi sebesar Rp.13.941.490,- sisa sebesar Rp.3.482.254,- atau tercapai sebesar 80,01%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah rekening yang dibayarkan. Target capaian 12 rekening.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.140.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub kegiatan adalah Tersedianya jasa perbaikan/jumlah peralatan kerja yang diperbaiki. Target capaian 5 jenis.

E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.571.300,- dan terealisasi sebesar Rp.86.393.700,- sisa sebesar Rp.2.177.600,- atau tercapai sebesar 97,54%.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.720.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Subkegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara. Target capaian 10 unit.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.782.400,- sisa sebesar Rp.1.117.600,- atau tercapai sebesar 61.46%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya. Target capaian 12 unit.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.951.300,- dan terealisasi sebesar Rp.44.891.300,- sisa sebesar Rp.1.060.000,- atau tercapai sebesar 97.69%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara. Target capaian 1 unit.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan Kecamatan Karangsembung Tahun Anggaran 2021

(2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.158.070.500,- dan terealisasi sebesar Rp.157.510.500,- sisa sebesar Rp.560,- atau tercapai sebesar 99,65%.

Output Program adalah Jumlah Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Target capaian 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.436.400,- dan terealisasi sebesar Rp.44.244.400,- sisa sebesar Rp.192,- atau tercapai sebesar 99,57%.

Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.436.400,- dan terealisasi sebesar Rp.44.244.400,- sisa sebesar Rp.192,- atau tercapai sebesar 99,57%.

Output Subkegiatan adalah terkendalinya implementasi kebijakan kewenangan bupati. Target capaian 5 kegiatan.

- B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.316.000,- dan terealisasi sebesar Rp.45.948.000,- sisa sebesar Rp.368,- atau tercapai sebesar 99,21%.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.316.000,- dan terealisasi sebesar Rp.45.948.000,- sisa sebesar Rp.368,- atau tercapai sebesar 99,21%.

Output Sub kegiatan adalah terkendalinya implementasi kebijakan kewenangan bupati. Target capaian 3 kegiatan.

- C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.318.100,- dan terealisasi sebesar Rp.67.318.100,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.4.713.100,- dan terealisasi sebesar Rp.4.713.100,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan yang dilaksanakan. Target capaian 1 kegiatan.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.605.000,- dan terealisasi sebesar Rp.62.605.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output Sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat. Target capaian 7 kegiatan.

(2) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.46.874.900,- dan terealisasi sebesar Rp.46.506.900,- sisa sebesar Rp.368.000,- atau tercapai sebesar 99,21 %.

Output Program Prosentase peningkatan jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan. Target capaian 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.874.900,- dan terealisasi sebesar Rp.46.506.900,- sisa sebesar Rp.368.000,- atau tercapai sebesar 99,21 %.

Output kegiatan Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- a. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.874.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.506.900,- sisa sebesar Rp.368.000,- atau tercapai sebesar 99,21%.

OutputSubkegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan.Target capaian 6 kegiatan.

(3) PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.90.737.000,- dan terealisasi sebesar Rp.89.297.000,- sisa sebesar Rp.1.440.000,- atau tercapai sebesar 99,65 %.

OutputProgram Prosentase peningkatan kegiatankoordinasi untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum.Target capaian 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.35.000.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Outputkegiatan adalah Jumlah laporan kegiatan KoordinasiUpaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum.

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.35.000.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

OutputSub kegiatan adalah Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Target capaian 1 kegiatan.

B. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.737.000,- dan terealisasi sebesar Rp.54.297.000,- sisa sebesar Rp.1.440.000,- atau tercapai sebesar 97,42%.

Outputkegiatan adalah Jumlah laporan kegiatan KoordinasiPenerapan dan Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.737.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.297.000,- sisa sebesar Rp.1.440.000,- atau tercapai sebesar 97,42%. **Output**Subkegiatan adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan. Target capaian 13 Desa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT/RW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya sesuai dengan RT/RW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Hasil telaahan struktur dan pola ruang terhadap pelayanan di Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Struktur Ruang Saat ini	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1.	Ruas-Ruas Jalan	Ruas Jalan Kabupaten	Pengembangan jalan lingkungan berhotmix dan bebas banjir	Belum meratanya Infrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan	fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data jalan lingkungan yang belum termasuk dalam ruas jalan kabupaten
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (Non Hutan)	Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan sekitarnya	Data Drainase kurang memadai.	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data drainase

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Struktur Ruang Saat ini	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
3.	Sistem Perkotaan	Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem Perdesaan - Pengembangan fasilitas umum - Pengembangan perdagangan eceran, grosir, pasar dan sejenisnya 	Lemahnya Pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pelayanan sehingga pelayanan masih terbatas	fasilitasi pendataan dan pembinaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah
4.	Pusat Lingkungan	Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kurangnya pengawasan terhadap kebersihan lingkungan dan layanan persampahan	fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data tata bangunan dan pengawasan kebersihan lingkungan
5.	Kawasan rawan Bencana	Pemukiman		Belum adanya Tim Khusus Penanggulangan Bencana	Koordinasi penanggulangan bencana alam
6.	Kawasan Perumahan	Perumahan	Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan	Data rumah tinggal yang belum ada jaringan listrik kurang akurat.	
7.	Kawasan perdagangan dan jasa	Mix used		Kurangnya monitoring harga sembako	Koordinasi penanggulangan masalah sosial
8.	Kawasan pertanian	Agribisnis	Mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan yang memiliki strategis ekonomi	Memerlukan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan industri yang menunjang sektor pertanian.	Memfasilitasi pengembangan industri yang menunjang sektor pertanian

Kecamatan Karangsembung adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar, disamping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan disebelah selatan sebagian besar adalah hutan / dipinggiran hutan dengan daerah pertanian tadah hujan dan disebelah utara dengan pertanian teknis. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah. Kawasan hutan yang semakin lama semakin gundul akibat penebangan liar (illegal logging) menjadi kawasan ini semakin berkurang fungsinya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayanan di kecamatan dapat dilihat dibawah ini :

Rekapitulasi Faktor yang Mempengaruhi PelayananKecamatan

No	Telaah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4
	Tugas dan Fungsi SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas. 2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif. 3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas. 4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal. 5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal. 6. Sumber Daya aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturankeuangan terbatas. 7. Kualitas Sumber Daya aparatur yang memahamiperencanaan dan aturananggaran terbatas 8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan. 9. Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawabterhadap pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait 2. Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat 3. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur Pelaksana 4. Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik 5. Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran 6. Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasaran Aparatur 7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur 8. Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 9. Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur 10. Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan 11. Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat 12. Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

- a. Masih rendahnya kualitas sumber dayaaparatur
- b. Terbatasnya anggaran pegawai
- c. Kurang optimalnya pelayanan publik
- d. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan memaksimalkan kekuatan dan mengoptimalkan peluang yang ada. Dengan mengacu pada kekuatan dan peluang yang ada, dapat diambil suatu kebijakan yang menjadi landasan arah prioritas kerja dari Kecamatan Karangsembung, yaitu :peningkatan pelayanan terhadap masyarakat disegala bidang, optimalisasi sarana prasarana, peningkatan produktivitas, kualitas serta penguasaan penggunaan teknologi, peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur serta peningkatan koordinasi dengan dinas, instansi dan lembaga.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. VISI

Visi Kabupaten Cirebon merupakan gambaran yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 Kabupaten Cirebon peran serta Kecamatan Karangsembung harus dapat menjabarkan seluruh program dan kegiatannya selama periode tahun 2019-2024 yang tertuang dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Kecamatan Karangsembung. Penyusunan Renja Tahun 2023 ini merupakan landasan bagi peningkatan pembangunan yaitu membangun Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Karangsembung.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019-2024 yaitu : “ **Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman** ”.

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN			
MISI 1 : Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 2. Meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kecamatan	1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan.	1. Optimalisasi manajemen pelayanan public dengan mengedepankan pelayanan prima serta peningkatan kesejahteraan aparatur. 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.	Penyederhanaan Mekanisme dan standar Pelayanan
	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban	1. Integritas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	1. Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan secara

	Umum di Kecamatan.		Profesional dan Inovatif.
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.	1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.	2. Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
Terselenggaranya tata kelola baik, bersih dan smart serta penguatan otonomidaerah pemerintahan yang		Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya Integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan	Peningkatan Desa Tertib Administrasi

Ket: Renstra kecamatan Karangsembung 2019-2024

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Karangsembung dikaitkan dengan sasaran terget kinerja Renstra SKPD sebagaimana terlampir dalam tabel.

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana terlampir dalam tabel.

3.3. Jumlah Program dan Kegiatan

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Karangsembung untuk tahun 2023 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan / Semesteran SKPD
 3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyediaan Bahan/Material
 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan :
 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan :
 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 3. Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Sub Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Sub Kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

2. Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1) Sub Kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

3.4. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Rencana Program, kegiatan dan Sub kegiatan (perumusan Program, kegiatan dan Sub kegiatan) dapat dilihat dalam lampiran. .

BAB V

PENUTUP

Kecamatan Karangsembung telah berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai format terlampir yang telah disusun ini demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai suatu instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat dalam wilayah kerja kecamatan.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Karangsembung yang sudah ditetapkan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku meskipun anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

Semoga penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Karangsembung, Juni 2022
CAMAT KARANGSEMBUNG

SUJATMOKO, SP., MP
Pembina TK.I
NIP.19750226 200604 1 007

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KARANGSEMBUNG TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rupiah)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya interval Indeks kepuasan masyarakat	Point	79.15	Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat	Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang pelayanan umum	22,648,800	Kasi Pelayanan Umum
		Persentase penyelesaian perekaman e-KTP sesuai standar pelayanan	Persen	96,75				
		- Jumlah perekaman e-KTP		1.935				
		- Jumlah wajib e-KTP		2.000				
		Persentase penyelesaian surat pengantar pindah	Persen	100,00				
- Jumlah penerbitan surat pengantar pindah		40						
- Jumlah permohonan surat pengantar pindah		40						
Persentase masyarakat yang memiliki KTP	Persen	90.00						
- Jumlah masyarakat yang memiliki KTP		26.325						
- Jumlah masyarakat wajib KTP		29.249						
Persentase masyarakat yang memiliki KK	Persen	74,00						
- Jumlah masyarakat yang memiliki KK		12.010						
- Jumlah masyarakat wajib KK		13.797						
2.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)	Persen	100	Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat	Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa	5,126,400	Kasi Pemerintahan Umum dan pemerintahan desa
		- Jumlah penerbitan surat perubahan hak atas tanah		10				
		- Jumlah permohonan surat perubahan hak atas tanah		10				
		Persentase penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris	Persen	100				
		- Jumlah penerbitan surat keterangan waris		10				
		- Jumlah permohonan surat keterangan waris		10				
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan APBDes	Angka	13						
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan Perdes	Angka	13						
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes	Angka	13						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rupiah)	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Persentase partisipasi masyarakat desa dalam Pilwu - Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilwu - Jumlah daftar pemilih pada Pilwu	Persen	- - -				
		Jumlah partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa	Angka	56				
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB tepat waktu - Jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan - Jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan	Persen	85 17.917 17.917				
		Nilai AKIP/LAKIP Kecamatan	Huruf	C				
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti kecamatan - Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang telah ditindaklanjuti - Jumlah temuan BPK/Inspektorat	Persen	100 8 8				
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah di Kecamatan - Jumlah keseluruhan aset yang ada - Jumlah keseluruhan aset yang memiliki kesesuaian dengan KIB	Persen	100 113 103				
3.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan - Jumlah kehadiran dalam musrenbang - Jumlah undangan murenbang yang dibagikan	Persen	100 100 100	Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat	Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang Ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	36,259,900	Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat
		Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan RPJMDes	Angka	13				
		Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam pembentukan BUMDes	Angka	13				
		Jumlah desa yang menyelenggarakan	Angka	13				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rupiah)	Unit Kerja Penanggung Jawab
		musyawarah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui swakelola						
		Persentase penerbitan SKTM - Jumlah penerbitan SKTM - Jumlah permohonan SKTM	Persen	100 65 65	Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat	Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan rakyat	20,907,000	Kasi Kesejahteraan rakyat
4.	Terwujudnya kondisi wilayah yang kondusif, aman dan tertib.	Persentase penertiban rekomendasi SKCK - Jumlah penerbitan SKCK - Jumlah permohonan SKCK	Persen	100 252 252	Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat	Penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang Keamanan, ketertiban ,perlindungan masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa.	45,269,300	Kasi Keamanan, Ketertiban, Perlindungan masyarakat dan Kesatuan Bangsa
		Persentase penerbitan rekomendasi surat izin HO dan IMB - Jumlah penerbitan rekomendasi surat izin HO dan IMB - Jumlah permohonan rekomendasi surat izin HO dan IMB	Persen	100 4 4				
		Persentase gangguan kamtibmas yang diselesaikan - Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang telah diselesaikan - Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang yang terjadi	Persen	100 2 2				
		Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban menurun.	Angka	1				
		-						
		Prosentase tertib administrasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening	1	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	16.800.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rupiah)	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	Unit	12		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	4.000.000	
		Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	unit	2		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	550.000	
		Jumlah Alat tulis kantor	Paket	1		Penyediaan alat tulis kantor.	5.501.100	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	paket	1		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	1.655.900	
		Jumlah komponen instansi listrik penerangan	Jenis	4		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan.	2.065.000	
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	2		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	3.825.000	
		Jumlah surat kabar	paket	3		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	1.158.000	
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman	kali	2		Penyediaan makanan dan minuman.	2.080.000	
		Jumlah perjalanan dinas	kali	12		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	1.200.000	
		Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	Peningkatan	Pemeliharaan	47.000.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rupiah)	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	10	Sarana dan Prasarana Aparatur	Rutin Gedung kantor		
						Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas	33.264.000	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan	unit	2		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	3.825.000	
		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	buku	12	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	526,700	
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	berkas	2		Penyusunan laporan keuangan semesteran	442,000	
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	berkas	2		Penyusunan laporan keuangan semesteran	504,000	
		Jumlah dokumen perencanaan sektoral	berkas	2	Pengembangan sistem perencanaan sektoral	Penyusunan RKA	9,000,000	

